

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erna Sri Wibawanti & R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah & Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.
- I Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.
- Urip Santoso, *Hukum Perumahan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta, 2016.
- C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Jurnal/Skripsi

- N Nurhayati, "Pelaksanaan Landreform dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sleman", Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Abdul Qodir Jaelani & Purnawanti, "Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan *Fly Over* Jombor Kabupaten Sleman untuk Kepentingan Umum", *Supremasi Hukum Volume 5, No 1*, 2016.

Umar Aziz, “Politik Agraria: Konflik Pembangunan Apartemen Utara di Sleman”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Irna Nurhayati dan Dwi Haryati, “Implementasi Peraturan Perizinan Pembangunan Perumahan bagi Pengembang terkait Aspek Perlindungan Konsumen di DIY”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Indah, “Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Rechtidee Jurnal Hukum Volume 9 No. 2*, 2014.

Tri Setiady, “Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengurus Bidang Pertanahan dihubungkan dengan Hukum Positif”, *Fiat Justisia Jurnal Hukum Volume 8 No. 2*, 2014.

Sri Winarsi, “Wewenang Pertanahan di Era Otonomi”, *Jurnal Yuridika*, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan

Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Website

Serikat Petani Indonesia, “SPI Sleman ajak masyarakat Memanfaatkan Lahan Terlantar untuk Berdaulat Pangan”, diakses dari <http://www.spi.or.id/spi-sleman-ajak-masyarakat-memanfaatkan-lahan-terlantar-untuk-berdaulat-pangan/>, pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 15.53 WIB.

Portal Tata Ruang, “Peran Lembaga Pemerintah dalam Pembangunan”, diakses dari http://googleweblight.com/?lite_url=https://portaltataruang.wordpress.com/2007/09/19/peran-lembaga-pemerintah-dalam-pembangunan/&ei=11B2BOYZ&lc=en-ID&s=1&m=187&host=www.google.co.id&ts=1503495773&sig=ALNZjWln5yeAVFx3xnjrenOYtG-4syH9bQ, pada tanggal 23 Agustus 2017, pukul 22.59 WIB.

Ilman Hadi, “Sanksi bagi Pengembang Perumahan yang Tidak Sediakan Utilitas Umum”, diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a05923cb397/sanksi-bagi-pengembang-perumahan-yang-tidak-sediakan-utilitas-umum>, pada tanggal 23 Agustus 2017, pukul 11.18 WIB.

Ridha Wahyuni, “Kebijakan Agraria di Sektor Pertanahan, Kehutanan, Pertambangan, dan Migas”, diakses dari <http://uniridha.blogspot.co.id/2013/05/kebijakan-agraria-disektor-pertanahan.html?m=1>, pada tanggal 6 Juni 2017, pukul 10.41 WIB.

Andi Putra Parlindungan, “Administrasi Pertanahan”, diakses dari http://www.academia.edu/12301506/Administrasi_Pertanahan, pada tanggal 3 Agustus 2017, pukul 11.29 WIB.

Sovia Hasanah, “Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat”, diakses dari

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat>, pada tanggal 31 Juli 2017, pukul 15.33 WIB.